



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN WAJO
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidaya-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2021 telah selesai disusun. LAKIP ini disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil serta dapat dijadikan sebagai sarana untuk pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Penyusunan LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas pelaporan kinerja. LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, urusan dan jumlah program pendukung.

Materi LAKIP merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 dan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, sehingga diharapkan sasaran pembangunan dapat sinergis dalam perencanaan kinerjanya.

LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2021 merupakan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. Berdasarkan hal tersebut, maka semua unit di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo harus melaksanakan secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami berharap LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik ini dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai target yang telah ditetapkan, semoga dapat bermanfaat bagi semua.

Sengkang, 14 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO,**



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19740411 199303 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka menindak lanjuti tuntutan reformasi yang menghendaki terlaksananya Pemerintahan yang bertanggungjawab dan bebas dari pengaruh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka pemerintah telah mengkomodir tuntutan tersebut dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Kemudian ditindak lanjuti dengan Inpres Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan Pemerintah Daerah menyusun LKjIP setiap tahun. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut Pemerintah Kabupaten Wajo menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 yang mengacu kepada pedoman penyusunan LKjIP yang diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kinerja yang diukur dalam LKjIP ini didasarkan pada RENSTRA, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Wajo.

Dari hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa, kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2021, bertitik tolak terhadap 4 sasaran, 4 program yang implementasinya direalisasikan dalam 12 kegiatan dan 36 sub Kegiatan. Secara umum tingkat capaian kinerja kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2021 mencapai **99,84%** dan Realisasi Anggaran mencapai **96,82%**.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

KATA PENGANTAR..... ii

RINGKASAN EKSEKUTIF iv

DAFTAR ISIv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang I-1

B. Struktur Organisasi..... I-3

C. Aspek Strategis Serta Permasalahan Utama I-7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis..... II-11

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

Perangkat Daerah II-11

2. Publikasi II-12

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 II-12

1. Rekapitulasi PK Kepala Perangkat Daerah (Jabatan Tinggi

Pratama), Pejabat Administrator dan Pengawas..... II-14

2. PublikasiII-19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi..... III-20

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi III-21

2. Perbandingan Antara Realisasi dan Capaian

Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019..... III-28

3. Perbandingan Realisasi dan Target Renstra

Perangkat Daerah III-30

4. Perbandingan Realisasi Kerja Tahun ini Dengan

Standar Nasional Jika Ada III-31

5. Analisis Penyebab Peningkatan /Penurunan Kinerja

dan Solusi III-36

6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... III-39

7. Analisis Evaluasi Program dan Kegiatan III-44

B. Realisasi Anggaran

1. Realisasi Anggaran..... III-47

2. Rasio Belanja Terhadap Sasaran Perangkat Daerah III-52

3. Rasio Belanja Terhadap Sasaran RPJMD..... III-55

BAB IV PENUTUPIV-57

LAMPIRAN:

a. Jumlah Kebijakan Yang disusun Tahun 2021 yaitu :

1. Peraturan Bupati Wajo Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Revisi).

b. Penghargaan Yang diterima :

1. Top Leader on Digital Implementation 2021 dalam TOP DIGITAL AWARDS versi Majalah IT Works.
2. Top Digital Implementation 2021 on District Government (Level Star 4) dalam TOP DIGITAL AWARD Versi Majalan IT Works.
3. Achievement Award Lembaga Pemerhati Pers
4. Kabupaten WAjo sebagai Badan Publik Kategori “Cukup Informatif” dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan.

c. Bukti Pendukung :

5. PK Perubahan Tahun 2021
6. Rekapitulasi Anggaran Belanja (DPPA Perubahan)
7. Kebijakan
 1. Peraturan Bupati Wajo Nomor 154 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Revisi).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Nomor 2021 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo mempunyai tugas adalah membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo adalah :

- a. perumusan kebijakan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. pelaksanaan fungsi lain terhadap Kepala Dinas yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam rangk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo pada Bulan Desember 2021 terdapat sebanyak 46 orang Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari 27 Orang Aparatur Sipil Negara dan 19 Orang Non Aparatur Sipil Negara, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah ASN menurut Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Eselon
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2021

PENDIDIKAN		PANGKAT		ESELON	
JENJANG	JUMLAH (Orang)	JENJANG	JUMLAH (Orang)	JENJANG	JUMLAH (Orang)
S2	11	Pembina Utama Muda	-	II-a	1
S1	14	Pembina Tk. I	2	II-b	-
SMA	2	Pembina	1	III-a	1
		Penata Tk. I	10	III-b	3
		Penata	8	IV-a	12
		Penata Muda Tk. I	-		
		Penata Muda	2		
		Pengatur Tk. I	1		
		Pengatur Muda Tk. I	2		
		Juru Tk. I, I/d	1		
<i>Jumlah</i>	<i>27</i>	<i>Jumlah</i>	<i>27</i>		<i>17</i>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, 2021

Tabel 2
Jumlah Tenaga Non PNS SDM
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

No.	Pekerjaan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Operator Komputer	1	7	8
2	Pengadministrasi	2	4	6
3	Tenaga Sound System	3	0	3
4	Admin Website	1	0	1
5	Programmer	1	0	1
	<i>Jumlah</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>19</i>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, 2021

3. Saran dan Prasarana Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo pada Bulan Desember 2021, didukung oleh berbagai sarana dan prasarana penunjang kerja, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	KONDISI				JUMLAH
		BAIK	RUSAK			
			RINGAN	SEDANG	BERAT	
1	Gedung Kantor	0	1	0	0	1
2	Kendaraan Dinas Roda Empat	1	0	1	0	2
3	Komputer PC	7	0	0	3	10
4	Laptop / Notebook	6	0	0	0	6
5	Printer	9	0	0	3	12
6	Faximile	1	0	0	0	1
7	Meja Kerja Eselon	14	0	0	0	14
8	Meja Staf	22	0	0	0	22
9	Kursi Kerja Eselon	14	0	0	0	14
10	Kursi Staf	22	0	0	0	22
11	Kursi Tamu	4	0	0	0	4
12	Almari	4	0	0	0	4
13	Filling Kabinet	2	0	0	0	2
14	Air Conditioner (AC)	10	0	0	0	10
15	Kamera	2	0	0	0	2
16	Drone	2	0	0	0	2
17	White Board	1	0	0	0	1
18	Proyektor	1	0	0	0	1

Sumber : Pengurus Barang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Wajo, 2021

4. Belanja Besaran Organisasi

Tabel 4.
Belanja Organisasi
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2021 (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		REALIASASI ANGGARAN (Per 31 Desember 2021)
	POKOK	PERUBAHAN	JUMLAH	%	
PENDAPATAN	235.000.000,00	240.000.000,00	5.000.000,00	2,13	215.104.841,00
Pendapatan Asli Daerah	235.000.000,00	240.000.000,00	5.000.000,00	2,13	215.104.841,00
BELANJA	9.118.044.280,00	9.444.339.562,00	326.295.282,00	3,58	9.142.850.739,00
Belanja Tidak Langsung	2.878.539.580,00	2.780.173.862,00	2.657.032.523,00	(3,42)	2.657.032.523,00
Belanja Langsung	6.239.504.700,00	6.664.165.700,00	424.661.000,00	6,81	6.485.818.216,00

B. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, bidang informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris

Tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi penyusunan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Diskominfo.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas pokok membantu sekretaris melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas pokok melakukan perencanaan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil serta mengevaluasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi perencanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok membantu sekretaris menyusun rencana kegiatan, menyiapkan bahan, melaksanakan, membagi tugas, mengelola dan mengontrol urusan administrasi keuangan.

3. Bidang Humas dan Komunikasi Publik

Tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi perumusan kebijakan pengelolaan opini aspirasi dan pengaduan publik lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

4. Bidang Informatika dan Persandian

Tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan layanan dan tata kelola e-Government, pengembangan aplikasi dan pengelolaan data center, penyediaan dan pengelolaan infrastruktur serta jaringan teknologi informasi komunikasi terintegrasi Pemerintah Daerah, pengendalian penyelenggaraan jasa menara telekomunikasi dalam wilayah daerah, layanan tata kelola, operasional,

pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi.

5. Bidang Statistik Sektoral

Tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan survey dan kompilasi produk administrasi statistik sektoral, analisis dan diseminasi layanan statistik sektoral, serta distribusi dan produksi statistik sektoral.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

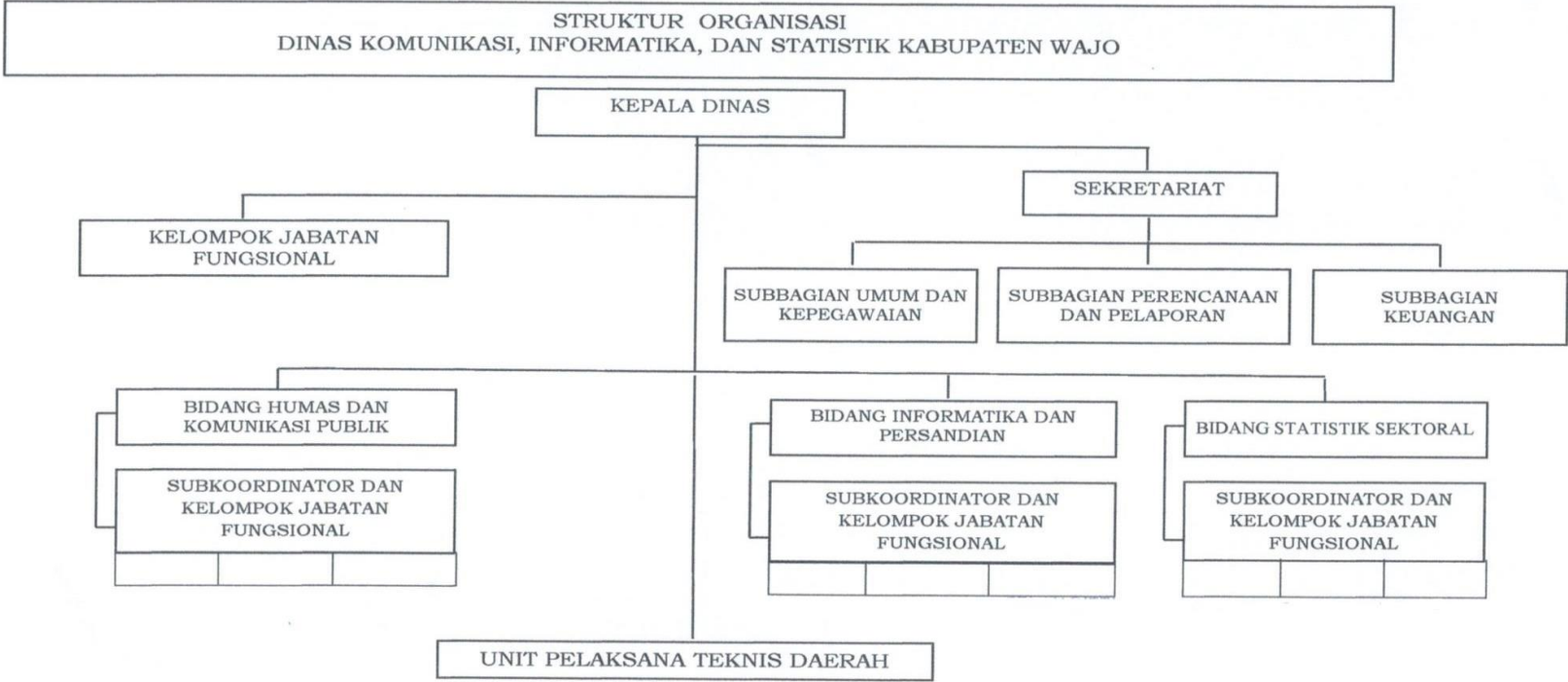
Tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Tugas pokok melakukan kegiatan dalam menunjang tugas Diskominfotik.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo, sebagai berikut :

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN
STATISTIK



C. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

Permasalahan organisasi merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja organisasi yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan organisasi pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

1. Permasalahan Internal Organisasi

Masalah internal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo adalah:

- a. Rendahnya motivasi, disiplin dan budaya kerja aparatur;
- b. Rendahnya kompetensi aparatur;
- c. Belum optimalnya inovasi dan kreativitas aparatur;
- d. Belum adanya reward dan punishment terhadap kinerja aparatur;
- e. Belum optimalnya dan efektifnya pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja aparatur;
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kerja;
- g. Terbatasnya jumlah aparatur pelaksana (fungsional umum);
- h. Belum optimalnya jejaring kerja dan koordinasi;
- i. Belum lengkapnya kebijakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. Terbatasnya pengelolaan anggaran; dan
- k. Belum terintegrasinya aplikasi dan pusat data center.

2. Permasalahan Eksternal Organisasi

Masalah eksternal Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo adalah:

- a. Luasnya wilayah pelayanan kinerja;
- b. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dan layanan masyarakat yang cepat, mudah, murah berbasis digitasi, terintegrasi dan aman;
- c. Implementasi berbagai peraturan perundang-undangan yang belum diterbitkannya petunjuk teknisnya;
- d. Tumpangtindihnya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan;
- e. Tingginya tuntutan masyarakat akan keterbukaan dan kecepatan penyampaian informasi;
- f. Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan;

- g. Masih terdapat wilayah yang tidak dijangkau pembangunan dan pelayanan jaringan teknologi informasi dan komunikasi;
- h. Tuntutan pemerintah terhadap data center dan pusat satu data yang terintegrasi;
- i. Belum optimalnya pemberdayaan pemangku kepentingan, swasta dan masyarakat dalam penyampaian informasi;
- j. Belum optimalnya peran produsen data dalam pengumpulan dan analisis data statistik sektoral; dan
- k. Belum optimalnya penyelesaian aduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR.

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- 1. Tugas dan Fungsi Organisasi Utama OPD
- 2. Sumber Daya Manusia
- 3. Sarana dan Prasarana Organisasi
- 4. Besaran Belanja Organisasi

B. Struktur Organisasi

C. Permasalahan Organisasi

- 1. Permasalahan Internal Organisasi
- 2. Permasalahan Eksternal Organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

- 1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
- 2. Publikasi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

- 1. Rekapitulasi PK Kepala Perangkat Daerah (Jabatan Tinggi Pratama), Pejabat Administrator dan Pengawas
- 2. Publikasi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

- 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja
- 2. Perbandingan antara Realisasi Capaian Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

3. Perbandingan Realisasi dan Target Renstra Perangkat Daerah
 4. Perbandingan Realisasi Kerja Tahun Ini dengan Standar Nasional
 5. Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Solusi
 6. Analisis dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 7. Analisis Evaluasi Program / Kegiatan
- B. Realisasi Anggaran
1. Realisasi Anggaran
 2. Rasio Belanja Terhadap Sasaran Perangkat Daerah
 3. Rasio Belanja terhadap Saaran RPJMD

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana perangkat daerah salah satunya adalah rencana strategis perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, maka Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Wajo dan Pemangku Kepentingan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024, maka dilakukan Perubahan terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 153.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 142 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo mempunyai Tujuan dan Sasaran dalam mendukung Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (IKU RPJMD) Tahun 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

**Tabel 2.1. Rencana Strategis
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
Tahun 2021**

IKU RPJMD	Target RPJMD Tahun 2021	Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Target Tujuan / Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2021
1	2	3	4	5
Indeks Reformasi Birokrasi	85.5	Tujuan 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B (65,01 - 70,00)
Nilai / Predikat SAKIP Kabupaten	65 / B	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja	Persentase capaian kinerja program dan kegiatan	85%
		Tujuan 2 : Meningkatkan Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks SPBE	2,01 - 2,30
		Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah berbasis elektronik	Indeks keterbukaan informasi	Cukup Informatif (61,00 - 68,50)
		Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral dalam penyusunan perencanaan pembangunan	10,01 - 30,00
		Sasaran 4 : Meningkatnya Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	15,01 - 20,00

2. Publikasi

The screenshot displays the 'Renstra' application interface. On the left is a dark sidebar menu with options like Dashboard, Dokumen SAKIP, and various reports. The main area has a header with the title 'Renstra' and a breadcrumb trail 'Dashboard / Renstra'. Below the header, there's a section titled 'UPLOAD DOC.' with filters for 'Semua' (All), 'AB', and 'CABI', and a dropdown for '10' items per page. A search bar is also present. The central part of the screen features a table listing documents. The table columns are No, Username, Unit Kerja, Tgl Upload, Dokumen, Ket, and Tanggapan. It contains 7 entries, each with a status icon in an orange box. At the bottom, it shows 'Showing 1 to 7 of 7 entries' and pagination controls for 'Previous', '1', and 'Next'.

No	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Ket	Tanggapan
1	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	27 Feb 2022 09:15		Dokumen Perubahan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024	
2	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	25 Aug 2021 14:12		Dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	
3	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	31 Mar 2021 09:07		Dokumen Rencana Strategis Tahun 2019-2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	
4	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	31 Mar 2020 14:43		Lampiran Tabel / Matriks Pendukung Dokumen Renstra Tahun 2019-2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	
5	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	31 Mar 2020 14:42		Dokumen Renstra Tahun 2019-2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	
6	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	22 Mar 2019 14:02		RENSTRA DISKOMINFO DAN STATISTIK	
7	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	23 May 2018 11:19		renstra	

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2021, menyebutkan bahwa Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 adalah **“Pemerintah Amanah, Menuju Wajo yang Maju dan Sejahtera”**, dengan rumusan Misinya yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola pemeritahan yang baik, bersih dan amanah;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan yang cerdas, sehat dan beriman;
3. Meningkatkan konektivitas dan infrastruktur dasar daerah yang berwawasan lingkungan; dan

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang merata dan berkeadilan.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan antara atasan dan bawahan selama 1 (satu) tahun dengan kinerja yang terukur dan dapat dicapai, maka target kinerja yang dijanjikan harus berkualitas outcome disamping output dan harus ada saling berkaitan dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara atasan dan bawahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan
- 4) Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Dalam mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo memiliki 4 Program dan 12 Kegiatan dengan pagu anggaran **Rp. 9.448.149.562,-**.

1. Rekapitulasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (Jabatan Tinggi Pratama), Pejabat Administrator dan Pengawas

Tabel 2.2. Rekapitulasi Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2021		Jumlah Pagu Tahun 2021		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya konektivitas layanan pemerintahan dan layanan publik perangkat daerah berbasis elektronik secara aman	Persentase Sistem Aplikasi yang Terintegrasi	6%	6%	Rp 3,005,400,000	Rp 3,005,400,000	Drs. Dwi Apryanto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK	90%	90%				
		Indek Keamanan Informasi	Tidak Layak	Tidak Layak	Rp 75,000,000	Rp 75,000,000		
	Terlaksananya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo	Frekuensi pelaksanaan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo	45%	45%	Rp 2,308,000,000	Rp 2,308,000,000	Imran AR., S.Sos., M.Si.	Kabid. Informatika dan Persandian
	Terselenggaranya sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah OPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa yang terkoneksi jaringan fiber optic/wireless	14 OPD	14 OPD	Rp 2,308,000,000	Rp 2,308,000,000	Mastahan, S.Sos., M.Si.	Kasi. Infrastruktur, Jaringan TIK dan Pengelolaan Data Center
		Luas wilayah yang tercoverage	1.973 Ha	1.973 Ha				
	Terlaksananya pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo	Frekuensi pelaksanaan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo	45%	45%	Rp 697,400,000	Rp 797,900,000	Imran AR., S.Sos., M.Si.	Kabid. Informatika dan Persandian
	Terlaksananya penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2 Indeks SPBE	2 Indeks SPBE	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	Silviani, S.Sos.	Kasi. Pengembangan Aplikasi dan E-Government
	Terlaksananya pengelolaan pusat data pemerintah	Jumlah layanan server cloud	1 Server Cloud	1 Server Cloud	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	Silviani, S.Sos.	Kasi. Pengembangan Aplikasi dan E-Government
	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah website pemerintah daerah yang dikelola	2 Website	2 Website	Rp 647,400,000	Rp 647,400,000	Silviani, S.Sos.	Kasi. Pengembangan Aplikasi dan E-Government
	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	100%	100%	Rp 35,000,000	Rp 26,816,000	Imran AR., S.Sos., M.Si.	Kabid. Informatika dan Persandian
	Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	1 Aparatur	0 Aparatur	Rp 10,000,000	Rp -	Reski Puspita Rini, S.Sos.	Kasi. Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2021		Jumlah Pagu Tahun 2021		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terlaksananya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah laporan hasil audit keamanan informasi	1 Laporan	1 Laporan	Rp 25,000,000	Rp 26,816,000	Reski Puspita Rini, S.Sos.	Kasi. Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi
	Terlaksananya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota	Frekuensi pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota	100%	100%	Rp 40,000,000	Rp 47,040,000	Imran AR., S.Sos., M.Si.	Kabid. Informatika dan Persandian
	Terlaksananya operasional jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah OPD menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)	41 OPD	41 OPD	Rp 40,000,000	Rp 47,040,000	Reski Puspita Rini, S.Sos.	Kasi. Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi
2	Meningkatnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif (60,00 - 68,50)	Cukup Informatif (60,00 - 68,50)	Rp 2,271,395,000	Rp 2,271,395,000	Drs. Dwi Apriyanto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah	Frekuensi pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	60%	60%	Rp 2,271,395,000	Rp 2,271,395,000	Safaruddin, S.STP., M.Si.	Kabid. Humas dan Komunikasi Publik
	Terlaksananya monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah aspirasi publik yang terlayani	15 Aspirasi	15 Aspirasi	Rp 25,000,000	Rp 30,250,000	Rahma Were Uleng Taufik, S.Sos., M.Si.	Kasi. Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengaduan Publik
	Terlaksananya monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Jumlah media komunikasi milik pemerintah	1 Media Komunikasi	1 Media Komunikasi	Rp 25,000,000	Rp 22,025,000	Asriyani, SE.	Kasi. Humas dan Pengelolaan Media Komunikasi
	Terlaksananya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan	60 Informasi	60 Informasi	Rp 1,786,395,000	Rp 2,087,276,000	Asriyani, SE.	Kasi. Humas dan Pengelolaan Media Komunikasi
		Jumlah profil pemerintah yang disusun	1 Profil	1 Profil				
	Terpenuhiya layanan hubungan media	Jumlah peliputan kegiatan Pemda yang dilaksanakan	70 Peliputan	70 Peliputan	Rp 370,000,000	Rp 398,844,000	Asriyani, SE.	Kasi. Humas dan Pengelolaan Media Komunikasi
		Frekuensi pelayanan jumlah pers	3 Kali	3 Kali				
	Terlaksananya pelayanan informasi publik	Jumlah informasi yang disampaikan ke masyarakat	12 Informasi	12 Informasi	Rp 40,000,000	Rp 63,700,000	Andy Usman, S.Sos.	Kasi. Layanan Informasi Publik
		Jumlah daftar informasi publik yang tersedia	7 Informasi	7 Informasi				
	Terlaksananya penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	25 KIM	25 KIM	Rp 25,000,000	Rp 25,000,000	Andy Usman, S.Sos.	Kasi. Layanan Informasi Publik
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel	Rasio Data Statistik Sektoral	30%	30%	Rp 136,324,000	Rp 136,324,000	Drs. Dwi Apriyanto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Terselenggaranya statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	85%	85%	Rp 136,423,000	Rp 97,314,000	Drs. Andi Ramlan Danial, M.Si.	Kabid. Statistik Sektoral

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2021		Jumlah Pagu Tahun 2021		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah buku statistik sektoral	1 Buku	0 Buku	Rp -	Rp -	Mayasari, S.Sos.	Kasi. Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah buku statistik sektoral	1 Buku	1 Buku	Rp 95,600,000	Rp 76,000,000	Juwita Hafid, S.STP., M.Si.	Kasi. Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral
		Jumlah laporan analisis data statistik sektoral	1 Laporan	1 Laporan				
		Jumlah laporan pelaksanaan forum data	3 Laporan	3 Laporan				
	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan SDM statistik	82 Peserta	82 Peserta	Rp 40,724,000	Rp 21,314,000	Muhammad Iqbal, S.IP.	Kasi. Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai / Kategori SAKIP Perangkat Daerah	B (65-70)	B (65-70)	Rp 3,629,925,280	Rp 3,629,925,280	Drs. Dwi Apriyanto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	C (30-50)	C (30-50)				
	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	Rp 36,000,000	Rp 36,000,000	Drs. Syamsul Jaya, M.Si.	Sekretaris
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) PD yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 23,500,000	Rp 23,500,000	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
		Jumlah dokumen Revisi Renstra yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen			Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan anggaran OPD yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP PD yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 3,500,000	Rp 3,500,000	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2021		Jumlah Pagu Tahun 2021		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Frekuensi pelaksanaan administrasi keuangan	100%	100%	Rp 2,587,539,580	Rp 2,485,363,862	Drs. Syamsul Jaya, M.Si.	Sekretaris
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangannya	12 Bulan	12 Bulan	Rp 2,578,539,580	Rp 2,476,363,862	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	Rp 4,500,000	Rp 4,500,000	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan
	Terselenggaranya administrasi umum	Frekuensi pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	Rp 291,010,000	Rp 296,762,000	Drs. Syamsul Jaya, M.Si.	Sekretaris
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Kali	12 Kali	Rp 21,460,000	Rp 21,460,000	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan	2 Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Frekuensi rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	110 Kali	110 Kali	Rp 268,050,000	Rp 268,050,000	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
	Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Frekuensi pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	Rp 280,615,000	Rp 326,615,000	Drs. Syamsul Jaya, M.Si.	Sekretaris
	Terlaksananya pengadaan meubel	Jumlah meubeler yang diadakan	2 Unit	2 Unit	Rp 56,665,000	Rp 56,665,000	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 Unit	2 Unit	Rp 223,950,000	Rp 223,950,000	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Frekuensi pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	Rp 344,760,700	Rp 350,433,700	Drs. Syamsul Jaya, M.Si.	Sekretaris
	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	670 Exempler	670 Exempler	Rp 50,735,700	Rp 50,735,700	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
		Jumlah alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan				
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Frekuensi pembayaran tagihan telepon, internet, air dan listrik	12 Kali	12 Kali	Rp 24,000,000	Rp 24,000,000	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Frekuensi penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Kali	12 Kali	Rp 40,000,000	Rp 40,000,000	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Frekuensi pelaksanaan urusan kepegawaian terpenuhi	11 Kali	11 Kali	Rp 230,025,000	Rp 230,025,000	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
		Frekuensi pelaksanaan administrasi keuangan	12 Kali	12 Kali				
		Jumlah pengelolaan penunjang urusan	30 Orang	30 Orang				

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2021		Jumlah Pagu Tahun 2021		Penanggung Jawab	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Nama	Jabatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Frekuensi pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	Rp 90,000,000	Rp 55,000,000	Drs. Syamsul Jaya, M.Si.	Sekretaris
	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaannya	12 Kali	12 Kali	Rp 7,000,000	Rp 7,000,000	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan pemeliharaannya	12 Kali	12 Kali			Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Frekuensi pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan	1 Unit	1 Unit	Rp 23,000,000	Rp 23,000,000	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Frekuensi pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	2 Unit			Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian

2. Publikasi

E-SAKIP REVIU diskominfotik.ka

https://esr.menpan.go.id/index.php/docs/pk

60%

e-SAKIP REVIU

Dashboard

Dokumen SAKIP

Renstra

IKU

Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja

Lainnya

Pengaturan

FAQ

Perjanjian Kinerja

Dashboard

Perjanjian Kinerja

UPLOAD DOC

Tahun: All CARI

10

Showing 1 to 9 of 9 entries

No	Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Ket	Tanggapan
1	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	27 Feb 2022 09:20		Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2022	
2	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	26 Aug 2021 12:04		Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	
3	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	31 Mar 2021 20:59		Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo	
4	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	03 Dec 2020 15:08		Reviu Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2020	
5	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	13 Sep 2020 13:02		Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2020	
6	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	31 Mar 2020 17:52		Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2020	
7	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	26 Mar 2019 14:21		Perjanjian Kinerja	
8	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	02 May 2018 14:33		PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA	
9	diskominfotik.kab.wajo	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik	02 Apr 2018 07:37		Perjanjian Kinerja	

Previous 1 Next

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam pengukuran capaian kinerja, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo membentuk Tim Pengelola Kinerja yang berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi, mengevaluasi dan mengukur sekaligus memberikan gambaran sejauhmana capaian kinerja, gambaran keberhasilan maupun kegagalan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja Kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo pada Tahun 2021 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi pada Tahun 2021.
2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja.
4. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Tabel 3.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo
Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya konektivitas layanan pemerintahan dan layanan publik perangkat daerah berbasis elektronik secara aman	Persentase sistem aplikasi yang terintegrasi	6%	30,43%	50,17%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Wajo
		Persentase pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur Jaringan TIK	90%	100%	111,11%	
		Indeks keamanan informasi	Tidak Layak	20,31	Tidak Layak	
2	Meningkatnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik	Indeks keterbukaan informasi	Cukup Informatif (60,00 - 68,50)	Cukup Informatif (61,42)	100%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Wajo
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel	Rasio data statistik sektoral	30%	0%	0%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Wajo
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai / kategori SAKIP perangkat daerah	B (65 - 70)	Belum dilakukan pemeriksaan	0%	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kab. Wajo
		Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	C (30 - 50)	Belum dilakukan pengukuran	0%	

Dari tabel di atas, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang terbagi dalam 7 (tujuh) indikator. Pada Tahun 2021 Realisasi persentase sistem aplikasi yang terintegrasi yaitu 30,43% dengan target 6% dan capaian yang diperoleh adalah 50,17%; Realisasi persentase pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur Jaringan TIK yaitu 100% dengan target 90% dan capaian yang diperoleh adalah 111,11%; Realisasi indeks keamanan informasi yaitu 20,31 (*tidak layak*) dengan target *tidak layak* dan capaian yang diperoleh adalah 100%; Realisasi indeks Keterbukaan Informasi yaitu cukup informative (61,42) dengan target cukup informative (60,00 – 68,50) dan capaian yang diperoleh adalah 100%; Realisasi rasio data statistik sektoral 0% karena belum ada data yang diperoleh, dengan target 30% dimana capaiannya masih 0%; Realisasi nilai / kategori SAKIP perangkat daerah belum dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Daerah dengan target B (65-70) dan capaian yang diperoleh adalah 0%; dan Realisasi indeks reformasi birokrasi perangkat daerah adalah 0% karena belum dilakukan pengukuran dengan target C (30-50) dan capaian yang diperoleh adalah 0%.

Tabel 3.1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya konektivitas layanan pemerintahan dan layanan publik perangkat daerah berbasis elektronik secara aman

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Keterangan
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran 1 : Meningkatnya konektivitas layanan pemerintahan dan layanan publik perangkat daerah berbasis elektronik secara aman	Persentase Sistem Aplikasi yang Terintegrasi	6%	30,43%	50,17%	Drs. Dwi Apriyanto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK	90%	100%	111,11%			
		Indek Keamanan Informasi	Tidak Layak	20,31	Tidak Layak			
1	Terlaksananya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo	Frekuensi pelaksanaan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo	45%	45%	100%	Imran AR., S.Sos., M.Si.	Kabid. Informatika dan Persandian	
	1 Terselenggaranya sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah OPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa yang terkoneksi jaringan fiber optic/wireless	14 OPD	14 OPD	100%	Mastahan, S.Sos., M.Si.	Kasi. Infrastruktur, Jaringan TIK dan Pengelolaan Data Center	
		Luas wilayah yang tercoverage	1.973 Ha	1.973 Ha	100%			
2	Terlaksananya pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo	Frekuensi pelaksanaan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo	45%	45%	100%	Imran AR., S.Sos., M.Si.	Kabid. Informatika dan Persandian	
1	Terlaksananya penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2 Indeks SPBE	2 Indeks SPBE	100%	Silviani, S.Sos.	Kasi. Pengembangan Aplikasi dan E-Government	
2	Terlaksananya pengelolaan pusat data pemerintah	Jumlah layanan server cloud	1 Server Cloud	1 Server Cloud	100%	Silviani, S.Sos.	Kasi. Pengembangan Aplikasi dan E-Government	
3	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah website pemerintah daerah yang dikelola	2 Website	2 Website	100%	Silviani, S.Sos.	Kasi. Pengembangan Aplikasi dan E-Government	
3	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	Imran AR., S.Sos., M.Si.	Kabid. Informatika dan Persandian	
1	Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Aparatur	0 Aparatur	0%	Reski Puspita Rini, S.Sos.	Kasi. Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	
2	Terlaksananya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah laporan hasil audit keamanan informasi	1 Laporan	1 Laporan	100%	Reski Puspita Rini, S.Sos.	Kasi. Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	
4	Terlaksananya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota	Frekuensi pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	Imran AR., S.Sos., M.Si.	Kabid. Informatika dan Persandian	
1	Terlaksananya operasional jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah OPD menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)	41 OPD	41 OPD	100%	Reski Puspita Rini, S.Sos.	Kasi. Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi	

Tabel 3.1.2. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Keterangan
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran 2 : Meningkatnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif (60,00 - 68,50)	Cukup Informatif (61,41)	100%	Drs. Dwi Apriyanto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
1	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah	Frekuensi pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	60%	60%	100%	Safaruddin, S.STP., M.Si.	Kabid. Humas dan Komunikasi Publik	
1	Terlaksananya monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah aspirasi publik yang terlayani	15 Aspirasi	15 Aspirasi	100%	Rahma Were Uleng Taufik, S.Sos., M.Si.	Kasi. Pengelolaan Opini, Aspirasi dan Pengaduan Publik	
2	Terlaksananya monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Jumlah media komunikasi milik pemerintah	1 Media Komunikasi	1 Media Komunikasi	100%	Asriyani, SE.	Kasi. Humas dan Pengelolaan Media Komunikasi	
3	Terlaksananya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan	60 Informasi	60 Informasi	100%	Asriyani, SE.	Kasi. Humas dan Pengelolaan Media Komunikasi	
		Jumlah profil pemerintah yang disusun	1 Profil	1 Profil	100%			
4	Terpenuhinya layanan hubungan media	Jumlah peliputan kegiatan Pemda yang dilaksanakan	70 Peliputan	70 Peliputan	100%	Asriyani, SE.	Kasi. Humas dan Pengelolaan Media Komunikasi	
		Frekuensi pelayanan jumlah pers	3 Kali	3 Kali	100%			
5	Terlaksananya pelayanan informasi publik	Jumlah informasi yang disampaikan ke masyarakat	12 Informasi	12 Informasi	100%	Andy Usman, S.Sos.	Kasi. Layanan Informasi Publik	
		Jumlah daftar informasi publik yang tersedia	7 Informasi	7 Informasi	100%			
6	Terlaksananya penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	25 KIM	25 KIM	100%	Andy Usman, S.Sos.	Kasi. Layanan Informasi Publik	

Tabel 3.1.3. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Keterangan
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel	Rasio Data Statistik Sektoral	30%	0%	0%	Drs. Dwi Apriyanto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belum dilakukan penilaian
1	Terselenggaranya statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	85%	85%	100%	Drs. Andi Ramlan Danial, M.Si.	Kabid. Statistik Sektoral	
1	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah buku statistik sektoral	0 Buku	0 Buku	100%	Mayasari, S.Sos.	Kasi. Kompilasi Produk Administrasi Statistik Sektoral	
2	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah buku statistik sektoral	1 Buku	1 Buku	100%	Juwita Hafid, S.STP., M.Si.	Kasi. Analisis dan Diseminasi Layanan Statistik Sektoral	
		Jumlah laporan analisis data statistik sektoral	1 Laporan	1 Laporan	100%			
		Jumlah laporan pelaksanaan forum data	3 Laporan	3 Laporan	100%			
3	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan SDM statistik	82 Peserta	82 Peserta	100%	Muhammad Iqbal, S.IP.	Kasi. Distribusi dan Produksi Statistik Sektoral	

Tabel 3.1.4. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis 4 Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Keterangan
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai / Kategori SAKIP Perangkat Daerah	B (65-70)	0%	0%	Drs. Dwi Apriyanto, SH., MT., M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belum dilakukan pemeriksaan dan pengukuran
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	C (30-50)	0%	0%			
	1 Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	Drs. Syamsul Jaya, M.Si.	Sekretaris	
	1 Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) PD yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	
		Jumlah dokumen Revisi Renstra yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	
	2 Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan anggaran OPD yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	
	3 Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	
	4 Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	
	5 Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	
	6 Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP PD yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	
	7 Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	
	2 Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Frekuensi pelaksanaan administrasi keuangan	100%	100%	100%	Drs. Syamsul Jaya, M.Si.	Sekretaris	
	1 Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangannya	12 Bulan	12 Bulan	100%	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	
	2 Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	
	3 Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100%	Amaliah Kartini N., SE., M.Si.	Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan	
	3 Terselenggaranya administrasi umum	Frekuensi pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	Drs. Syamsul Jaya, M.Si.	Sekretaris	
	1 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Kali	12 Kali	100%	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
	2 Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan praturan perundang-undangan yang disediakan	2 Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan	2 Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan	100%	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
	3 Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Frekuensi rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	110 Kali	110 Kali	100%	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	

No.	Sasaran Strategis / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator	Target Tahun 2021	Realisasi	Capaian (%)	Penanggung Jawab		Keterangan
						Nama	Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4 Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Frekuensi pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	Drs. Syamsul Jaya, M.Si.	Sekretaris	
	1 Terlaksananya pengadaan meubel	Jumlah meubeler yang diadakan	2 Unit	2 Unit	100%	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
	2 Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 Unit	2 Unit	100%	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
	5 Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Frekuensi pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	Drs. Syamsul Jaya, M.Si.	Sekretaris	
	1 Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	670 Exempler	670 Exempler	100%	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
		Jumlah alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%			
	2 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Frekuensi pembayaran tagihan telepon, internet, air dan listrik	12 Kali	12 Kali	100%	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
	3 Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Frekuensi penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Kali	12 Kali	100%	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
	4 Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Frekuensi pelaksanaan urusan kepegawaian terpenuhi	11 Kali	11 Kali	100%	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
		Frekuensi pelaksanaan administrasi keuangan	12 Kali	12 Kali	100%			
		Jumlah pengelolaan penunjang urusan	30 Orang	30 Orang	100%			
	6 Terpeliharanya barang milik daerah	Frekuensi pelaksanaan administrasi umum	100%	100%	100%	Drs. Syamsul Jaya, M.Si.	Sekretaris	
	1 Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaannya	12 Kali	12 Kali	100%	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
	2 Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan pemeliharaannya	12 Kali	12 Kali	100%	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
	3 Tersedianya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Frekuensi pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan	1 Unit	1 Unit	100%	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
	4 Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Frekuensi pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit	2 Unit	100%	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
	5 Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	1 Unit	1 Unit	100%	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	
	6 Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100%	Andi Baso Tenrijaja, S.Sos.	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	

2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI CAPAIAN TAHUN 2021 DENGAN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2019

a. Capaian Realisasi Tahun 2019-2021

Perbandingan hasil indikator pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.

PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2019 DENGAN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi			Keterangan
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya konektivitas layanan pemerintahan dan layanan publik perangkat daerah berbasis elektronik secara aman	Persentase sistem aplikasi yang terintegrasi	-	28%	30,43%	
		Persentase pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur Jaringan TIK	-	41%	100%	
		Indeks keamanan informasi	-	0	20,31	
2	Meningkatnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik	Indeks keterbukaan informasi	-	Kurang Informatif (57,71)	Cukup Informatif (61,42)	
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel	Rasio data statistik sektoral	-	0%	0%	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai / kategori SAKIP perangkat daerah	-	A	Belum dilakukan pemeriksaan	
		Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	-	CC	Belum dilakukan pengukuran	

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase sistem aplikasi yang terintegrasi pada tahun 2020 realiasinya adalah 28% sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 30,43%, hal ini didukung dengan tingginya motivasi dan niat pimpinan dalam mengintegrasikan berbagai aplikasi dalam satu portal data dan juga dengan adanya dukungan tim kerja dalam pembuatan aplikasi yang bersinergi secara optimal.
2. Persentase pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur jaringan TIK realisasinya pada tahun 2020 adalah 41% sedangkan ditahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 100%, hal ini dikarenakan tingginya jaringan TIK khususnya jaringan internet dan server pada perangkat daerah dan niat baik kepala perangkat daerah akan arti pentingnya jaringan TIK.
3. Indeks keterbukaan informasi pada tahun 2019 dan 2020 belum dijadikan sebagai salah satu indikator sasaran strategis perangkat daerah dan baru tahun 2021 dijadikan sebagai salah satu indikator pendukung sasaran strategis perangkat daerah dengan realisasi 20,31% (tidak layak), hasil ini diperoleh setelah dilakukannya evaluasi terkait indeks keamanan informasi (KAMI) dari provinsi.
4. Indeks keterbukaan informasi di tahun 2020 masih kurang informatif (57,71) sedangkan di tahun 2021 meningkat menjadi cukup informatif (61,42).
5. Indikator Nilai Sakip dan Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah belum dapat diukur pada tahun 2021 disebabkan pengukuran indikator tersebut dilakukan pada periode tahun selanjutnya. Pada tahun 2020 indikator Nilai Sakip mendapat predikat nilai A sedangkan indeks reformasi birokrasi mendapatkan nilai CC, hal ini dapat terjadi karena adanya kerjasama antar bidang dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

3. PERBANDINGAN REALISASI DAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Tabel 3.3.

Perbandian Antara Realisasi Kinerja Dengan Target Renstra Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Target PK Tahun 2021	Target Renstra Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya konektivitas layanan pemerintahan dan layanan publik perangkat daerah berbasis elektronik secara aman	Persentase sistem aplikasi yang terintegrasi	6%	6%	30,43%	
		Persentase pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur Jaringan TIK	90%	90%	100%	
		Indeks keamanan informasi	Tidak Layak	Tidak Layak	20,31	
2	Meningkatnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik	Indeks keterbukaan informasi	Cukup Informatif (60,00 - 68,50)	Cukup Informatif (61,00 - 68,50)	Cukup Informatif (61,42)	
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel	Rasio data statistik sektoral	30%	30%	0%	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai / kategori SAKIP perangkat daerah	B (65 - 70)	B (65,01 - 70,00)	0%	
		Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	C (30 - 50)	C (30 - 50)	0%	

4. PERBANDINGAN REALISASI KERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL (Jika Ada)

Tabel 3.4.

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Target PK Tahun 2021	Data Standar Nasional (jika ada)	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Sasaran 1 : Meningkatnya konektivitas layanan pemerintahan dan layanan publik perangkat daerah berbasis elektronik secara aman	Persentase Sistem Aplikasi yang Terintegrasi	6%		30,43%	
		Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK	90%		100%	
		Indek Keamanan Informasi	Tidak Layak		20,31	
	Terlaksananya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo	Frekuensi pelaksanaan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo	45%		45%	
	Terselenggaranya sistem jaringan intra pemerintah daerah	Jumlah OPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa yang terkoneksi jaringan fiber optic/wireless	14 OPD		14 OPD	
		Luas wilayah yang tercoverage	1.973 Ha		1.973 Ha	
	Terlaksananya pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo	Frekuensi pelaksanaan pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo	45%		45%	
	Terlaksananya penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2 Indeks SPBE		2 Indeks SPBE	
	Terlaksananya pengelolaan pusat data pemerintah	Jumlah layanan server cloud	1 Server Cloud		1 Server Cloud	
	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	Jumlah website pemerintah daerah yang dikelola	2 Website		2 Website	
	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	100%		100%	
	Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah sumber daya aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya	0 Aparatur		0 Aparatur	
	Terlaksananya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah laporan hasil audit keamanan informasi	1 Laporan		1 Laporan	
	Terlaksananya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota	Frekuensi pelaksanaan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota	100%		100%	
	Terlaksananya operasional jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah OPD menggunakan Jaringan Komunikasi Sandi (JKS)	41 OPD		41 OPD	

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Target PK Tahun 2021	Data Standar Nasional (jika ada)	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
2	Sasaran 2 : Meningkatnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	Cukup Informatif (60,00 - 68,50)		Cukup Informatif (61,42)	
	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah	Frekuensi pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	60%		60%	
	Terlaksananya monitoring opini dan aspirasi publik	Jumlah aspirasi publik yang terlayani	15 Aspirasi		15 Aspirasi	
	Terlaksananya monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	Jumlah media komunikasi milik pemerintah	1 Media Komunikasi		1 Media Komunikasi	
	Terlaksananya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Jumlah informasi pembangunan daerah yang disebarluaskan	60 Informasi		60 Informasi	
		Jumlah profil pemerintah yang disusun	1 Profil		1 Profil	
	Terpenuhinya layanan hubungan media	Jumlah peliputan kegiatan Pemda yang dilaksanakan	70 Peliputan		70 Peliputan	
		Frekuensi pelayanan jumlah pers	3 Kali		3 Kali	
	Terlaksananya pelayanan informasi publik	Jumlah informasi yang disampaikan ke masyarakat	12 Informasi		12 Informasi	
		Jumlah daftar informasi publik yang tersedia	7 Informasi		7 Informasi	
	Terlaksananya penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibina	25 KIM		25 KIM	

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Target PK Tahun 2021	Data Standar Nasional (jika ada)	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
3	Sasaran 3 : Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel	Rasio Data Statistik Sektoral	30%		0%	
	Terselenggaranya statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	Cakupan pelaksanaan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	85%		85%	
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah buku statistik sektoral	0 Buku		0 Buku	
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Jumlah buku statistik sektoral	1 Buku		1 Buku	
		Jumlah laporan analisis data statistik sektoral	1 Laporan		1 Laporan	
		Jumlah laporan pelaksanaan forum data	3 Laporan		3 Laporan	
	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan SDM statistik	82 Peserta		82 Peserta	
4	Sasaran 4 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai / Kategori SAKIP Perangkat Daerah	B (65-70)		0%	
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	C (30-50)		0%	
	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%		100%	
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen Rencana Kerja (Renja) PD yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen		1 Dokumen	
		Jumlah dokumen Revisi Renstra yang disusun tepat waktu	1 Dokumen		1 Dokumen	
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan anggaran OPD yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen		1 Dokumen	
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP PD yang tersusun tepat waktu	1 Dokumen		1 Dokumen	
	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang disusun tepat waktu	1 Dokumen		1 Dokumen	

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Target PK Tahun 2021	Data Standar Nasional (jika ada)	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Frekuensi pelaksanaan administrasi keuangan	100%		100%	
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yang tersedia gaji dan tunjangan	12 Bulan		12 Bulan	
	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 Laporan		1 Laporan	
	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 Laporan		1 Laporan	
	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	Frekuensi pelaksanaan administrasi umum	100%		100%	
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 Kali		12 Kali	
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan praturan perundang-undangan yang disediakan	2 Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan		2 Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan	
	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Frekuensi rapat-rapat, koordinasi, konsultasi dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	110 Kali		110 Kali	
	Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Frekuensi pelaksanaan administrasi umum	100%		100%	
	Terlaksananya pengadaan meubel	Jumlah meubeler yang diadakan	2 Unit		2 Unit	
	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 Unit		2 Unit	
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Frekuensi pelaksanaan administrasi umum	100%		100%	
	Tersedianya jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	670 Exempler		670 Exempler	
		Jumlah alat tulis kantor	12 Bulan		12 Bulan	
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Frekuensi pembayaran tagihan telepon, internet, air dan listrik	12 Kali		12 Kali	
	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Frekuensi penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12 Kali		12 Kali	
	Tersedianya jada pelayanan umum kantor	Frekuensi pelaksanaan urusan kepegawaian terpenuhi	11 Kali		11 Kali	
		Frekuensi pelaksanaan administrasi keuangan	12 Kali		12 Kali	
		Jumlah pengelolaan penunjang urusan	30 Orang		30 Orang	

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Target PK Tahun 2021	Data Standar Nasional (jika ada)	Realisasi Tahun 2021	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Frekuensi pelaksanaan administrasi umum	100%		100%	
	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan yang disediakan jasa pemeliharaannya	12 Kali		12 Kali	
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan pemeliharaannya	12 Kali		12 Kali	
	Tersedianya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Frekuensi pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan	1 Unit		1 Unit	
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Frekuensi pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit		2 Unit	
	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	1 Unit		1 Unit	
	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	

5. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN / PENURUNAN KINERJA DAN SOLUSI

Tabel 3.5.

Analisis Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Solusi

No.	Indikator	Capaian (%)	Penyebab Peningkatan / Penurunan Kinerja	Solusi
1	2	3	4	5
1	Persentase sistem aplikasi yang terintegrasi	50,17%	Adanya pengintegrasian berbagai aplikasi yang telah terbangun dan terdistribusi baik oleh Pemerintah maupun Perangkat Daerah lainnya dalam menerapkan e-government	Meningkatkan layanan administrasi pemerintahan dan layanan masyarakat berbasis digitasi dan terintegrasi
2	Persentase pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur Jaringan TIK	111,11%	Tersedianya pengelolaan dan konektivitas jaringan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung smart city, smart village dan blank spot	Meningkatkan pembangunan dan pelayanan jaringan teknologi informasi dan komunikasi kepada perangkat daerah dan masyarakat
3	Indeks keamanan informasi	Tidak Layak	Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional sandiman	Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional sandiman
4	Indeks keterbukaan informasi	100%	Adanya penyebaran informasi kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah secara digital	Meningkatkan literasi digital dan kerjasama dengan media cetak, media elektronik dan media online dalam penyebaran informasi kepada masyarakat
5	Rasio data statistik sektoral	0%	Belum optimalnya kuantitas dan kualitas aparatur fungsional statistisi	Alihfungsi pejabat struktural ke fungsional statistisi
			Belum optimalnya forum satu data	Adanya kebijakan tentang Satu Data Kabupaten Wajo
			Belum optimalnya koordinasi pemanfaatan portal satu data	Adanya Portal Satu Data Kabupaten Wajo
6	Nilai / kategori SAKIP perangkat daerah	0%	-	-
7	Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	0%	-	-

a. Faktor Keberhasilan

Pada Tahun 2021 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian guna mencapai visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagai berikut :

- a) Capaian indikator sasaran strategis pertama yaitu persentase system aplikasi yang terintegrasi

b. Faktor Penghambat

Dalam mencapai sasaran strategis terdapat beberapa hambatan ataupun kendala. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo dalam pemenuhan target kinerja tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

- a) sebagian besar produk akhir Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo terutama dalam urusan statistik memerlukan pelibatan pihak luar. Seringkali hal tersebut menjadi penghambat dalam proses penyelesaian output kegiatan yang berimplikasi pada tidak konsistennya waktu penyelesaian pekerjaan.
- b) Adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19, selain pemotongan anggaran yang menyebabkan tidak tercapainya target, dilakukan juga penjadwalan ulang kegiatan, sehingga menghambat proses penyelesaian kegiatan.

c. Solusi dalam penyelesaian hambatan

Berdasarkan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo sepanjang Tahun 2021, dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun selanjutnya yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan koordinasi dan pengelolaan dengan lembaga-lembaga vertical yang ada diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan data dan informasi yang terbaru sebagai bahan penyusunan perencanaan di semua bidang / sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.
- b) Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait di pusat maupun di daerah.
- c) Penyusunan perencanaan kegiatan dengan lebih cermat dalam upaya mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan pencapaian kinerja dengan memperhatikan kemampuan Sumber Daya Manusia

(SDM) yang ada serta berbagai faktor lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pencapaian kinerja kegiatan.

- d) Meningkatkan monitoring dan evaluasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran kinerja kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah dibuat.
- e) Sosialisasi terus menerus kepada masyarakat maupun berbagai perangkat daerah di Kabupaten Wajo untuk mensukseskan dan memaksimalkan penggunaan berbagai layanan yang disediakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo.
- f) Meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.

6. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Tabel 3.6.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Capaian (%)	Jumlah Anggaran			Analisis Efisiensi Sumber Daya	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik	100%	Rp 9,444,339,562	Rp 9,143,850,739	96.82	13 Orang	
1	Meningkatnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik	100%	Rp 2,627,095,000	Rp 2,604,273,223	99.13		
	Terlaksananya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah	100%	Rp 2,627,095,000	Rp 2,604,273,223	99.13		
	Terlaksananya monitoring opini dan aspirasi publik	100%	Rp 30,250,000	Rp 29,190,212	96.50		
	Terlaksananya monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	100%	Rp 22,025,000	Rp 21,984,750	99.82		
	Terlaksananya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	100% 100%	Rp 2,087,276,000	Rp 2,073,388,500	99.33		
	Terpenuhinya layanan hubungan media	100% 100%	Rp 398,844,000	Rp 394,332,673	98.87		
	Terlaksananya pelayanan informasi publik	100% 100%	Rp 63,700,000	Rp 61,891,499	97.16		
	Terlaksananya penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	100%	Rp 25,000,000	Rp 23,485,589	93.94		

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Capaian (%)	Jumlah Anggaran			Analisis Efisiensi Sumber Daya	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Meningkatnya konektivitas layanan pemerintahan dan layanan publik perangkat daerah berbasis elektronik secara aman	100%	Rp 3,169,756,000	Rp 3,052,590,214	96.30	10 Orang	
		100%					
		Tidak Layak					
	Terlaksananya pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo	100%	Rp 2,308,000,000	Rp 2,237,289,614	96.94		
	Terselenggaranya sistem jaringan intra pemerintah daerah	100%	Rp 2,308,000,000	Rp 2,237,289,614	96.94		
		100%					
	Terlaksananya pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten wajo	100%	Rp 787,900,000	Rp 746,316,600	94.72		
	Terlaksananya penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	100%	Rp 25,000,000	Rp 21,871,600	87.49		
	Terlaksananya pengelolaan pusat data pemerintah	100%	Rp 25,000,000	Rp 13,000,000	52.00		
	Terlaksananya pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	100%	Rp 737,900,000	Rp 711,445,000	96.41		
	Terselenggaranya persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	100%	Rp 26,816,000	Rp 26,158,000	97.55		
	Terlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	0%	Rp -	Rp -	0.00		
	Terlaksananya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	100%	Rp 26,816,000	Rp 26,158,000	97.55		
	Terlaksananya penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota	100%	Rp 47,040,000	Rp 42,826,000	91.04		
	Terlaksananya operasional jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota	100%	Rp 47,040,000	Rp 42,826,000	91.04		

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Capaian (%)	Jumlah Anggaran			Analisis Efisiensi Sumber Daya	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel	0%	Rp 97,314,000	Rp 90,575,334	93.08	10 Orang	
	Terselenggaranya statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	100%	Rp 97,314,000	Rp 90,575,334	93.08		
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	100%	Rp -	Rp -	0.00		
	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	100%	Rp 76,000,000	Rp 69,261,334	91.13		
		100%					
		100%					
	Terselenggaranya peningkatan kapasitas SDM pemerintah dareah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	100%	Rp 21,314,000	Rp 21,314,000	100.00		
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	0%	Rp 3,550,174,562	Rp 3,396,411,968	95.67	13 Orang	
		0%					
	Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Rp 36,000,000	Rp 31,118,200	86.44		
	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	100%	Rp 23,500,000	Rp 21,368,200	90.93		
		100%					
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	100.00		
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	100.00		
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	100%	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	100.00		
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	100%	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	100.00		
	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	Rp 3,500,000	Rp 3,500,000	100.00		
	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Rp 4,500,000	Rp 1,750,000	38.89		

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Capaian (%)	Jumlah Anggaran			Analisis Efisiensi Sumber Daya	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Rp 2,485,363,862	Rp 2,359,532,523	94.94		
	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	100%	Rp 2,476,363,862	Rp 2,357,032,523	95.18		
	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	100%	Rp 4,500,000	Rp 1,250,000	27.78		
	Terlaksananya koordinasi dan tersusunnya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	100%	Rp 4,500,000	Rp 1,250,000	27.78		
	Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah	100%	Rp 296,762,000	Rp 280,620,779	94.56		
	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100%	Rp 28,460,000	Rp 28,460,000	100.00		
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	100.00		
	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	Rp 266,802,000	Rp 250,660,779	93.95		
	Terselenggaranya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Rp 326,615,000	Rp 325,912,000	99.78		
	Terlaksananya pengadaan meubel	100%	Rp 62,165,000	Rp 62,165,000	100.00		
	Terlaksananya pengadaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Rp 264,450,000	Rp 263,747,000	99.73		
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 350,433,700	Rp 344,424,028	98.29		
	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	Rp 50,954,700	Rp 50,954,700	100.00		
		100%					
	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Rp 20,300,000	Rp 18,460,500	90.94		
	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Rp 40,000,000	Rp 39,710,000	99.28		
	Tersedianya jada pelayanan umum kantor	100%	Rp 239,179,000	Rp 235,298,828	98.38		
		100%					
		100%					

No.	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Capaian (%)	Jumlah Anggaran			Analisis Efisiensi Sumber Daya	Keterangan
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Rp 55,000,000	Rp 54,804,438	99.64		
	Tersedianya jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100%	Rp 7,000,000	Rp 6,904,870	98.64		
	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%					
	Tersedianya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100%	Rp 18,000,000	Rp 17,899,568	99.44		
	Tersedinaya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%					
	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	100%	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	100.00		
	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	100%	Rp -	Rp -	0		
	Jumlah		Rp 9,444,339,562	Rp 9,143,850,739			

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo terlibat semua sesuai dengan sasaran strategis.

7. ANALISIS EVALUASI PROGRAM / KEGIATAN

Berikut disajikan daftar analisis evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan

Tabel 3.7.
Analisis Evaluasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik	Indeks Keterbukaan Informasi	100%	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	Monitoring opini dan aspirasi publik				
						Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah				
						Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik				
						Pelayanan informasi publik				
						Layanan hubungan media				
						Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik				
2	Meningkatnya konektivitas layanan pemerintahan dan layanan publik perangkat daerah berbasis elektronik secara aman	Persentase Sistem Aplikasi yang Terintegrasi	100%	Pengelolaan aplikasi informasi	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah				
		Persentase Pemanfaatan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK	100%			Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten / kota				
						Pengelolaan pusat data pemerintahan daerah				
						Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintah berbasis elektronik				
		Indek Keamanan Informasi	Tidak Layak	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota	Operasional jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota	

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Keterangan
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel	Rasio Data Statistik Sektoral	0%	Penyelenggaraan statistik sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	Membangun metadata statistik sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	Nilai / Kategori SAKIP Perangkat Daerah	0%	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
						Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							
		Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD							
		Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya			
		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa surat menyurat			
		Evaluasi kinerja perangkat daerah					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			
		Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor			
						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		
		Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Penataan organisasi			Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
								Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan		
								Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo memiliki 5 Program, 12 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan. Terdiri dari yang terkait dengan sasaran strategis perangkat daerah ada 5 Program, 8 Kegiatan dan 23 sub kegiatan, sedangkan yang tidak terkait pencapaian sasaran strategis ada perangkat daerah ada 3 program, 7 kegiatan dan 14 sub kegiatan.

b. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang digunakan untuk mewujudkan kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2021 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja yang diimplementasikan melalui realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2021 telah tercapai sebesar 96,75% dengan rincian dapat dilihat pada tabel 3.8 sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran

Tabel 3.8.
Realisasi Anggaran
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2021															Keterangan
		Jumlah Pagu							Realisasi							Capaian (%)	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	2,602,973,862	631,845,700	-	-	-	315,915,000	3,550,734,562	2,476,645,023	604,650,075	-	-	-	315,212,000	3,396,507,098	95.66	
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	7,500,000	28,500,000	-	-	-	-	36,000,000	7,500,000	23,618,200	-	-	-	-	31,118,200	86.44	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2,500,000	21,000,000	-	-	-	-	23,500,000	2,500,000	18,868,200	-	-	-	-	21,368,200	90.93	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500,000	625,000	-	-	-	-	1,125,000	500,000	625,000	-	-	-	-	1,125,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500,000	625,000	-	-	-	-	1,125,000	500,000	625,000	-	-	-	-	1,125,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	500,000	625,000	-	-	-	-	1,125,000	500,000	625,000	-	-	-	-	1,125,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	500,000	625,000	-	-	-	-	1,125,000	500,000	625,000	-	-	-	-	1,125,000	100.00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,250,000	2,250,000	-	-	-	-	3,500,000	1,250,000	2,250,000	-	-	-	-	3,500,000	100.00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,750,000	2,750,000	-	-	-	-	4,500,000	1,750,000	-	-	-	-	-	1,750,000	38.89	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	2,482,673,862	3,250,000	-	-	-	-	2,485,923,862	2,359,532,523	-	-	-	-	-	2,359,532,523	94.92	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,480,173,862	-	-	-	-	-	2,480,173,862	2,357,032,523	-	-	-	-	-	2,357,032,523	95.03	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,250,000	3,250,000	-	-	-	-	4,500,000	1,250,000	-	-	-	-	-	1,250,000	27.78	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1,250,000	-	-	-	-	-	1,250,000	1,250,000	-	-	-	-	-	1,250,000	100.00	
	Administrasi umum perangkat daerah	-	295,262,000	-	-	-	1,500,000	296,762,000	-	279,120,779	-	-	-	1,500,000	280,620,779	94.56	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	28,460,000	-	-	-	-	28,460,000	-	28,460,000	-	-	-	-	28,460,000	100.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	1,500,000	100.00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	266,802,000	-	-	-	-	266,802,000	-	250,660,779	-	-	-	-	250,660,779	93.95	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	12,200,000	-	-	-	314,415,000	326,615,000	-	12,200,000	-	-	-	313,712,000	325,912,000	99.78	
	Pengadaan mebel	-	12,200,000	-	-	-	252,250,000	264,450,000	-	12,200,000	-	-	-	251,547,000	263,747,000	99.73	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-	-	62,165,000	62,165,000	-	-	-	-	-	62,165,000	62,165,000	100.00	

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2021															Keterangan
		Jumlah Pagu							Realisasi							Capaian (%)	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	112,800,000	237,633,700	-	-	-	-	350,433,700	109,612,500	234,811,528	-	-	-	-	344,424,028	98.29	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	50,954,700	-	-	-	-	50,954,700	-	50,954,700	-	-	-	-	50,954,700	100.00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	20,300,000	-	-	-	-	20,300,000	-	18,460,500	-	-	-	-	18,460,500	90.94	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	40,000,000	-	-	-	-	40,000,000	-	39,710,000	-	-	-	-	39,710,000	99.28	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	112,800,000	126,379,000	-	-	-	-	239,179,000	109,612,500	125,686,328	-	-	-	-	235,298,828	98.38	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	-	55,000,000	-	-	-	-	55,000,000	-	54,899,568	-	-	-	-	54,899,568	99.82	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-	-	7,000,000	100.00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	18,000,000	-	-	-	-	18,000,000	-	17,899,568	-	-	-	-	17,899,568	99.44	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	-	30,000,000	100.00	
2	Program informasi dan komunikasi publik	2,061,802,500	265,292,500	-	-	-	-	2,327,095,000	2,045,715,000	258,558,223	-	-	-	-	2,304,273,223	99.02	
	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten / kota	2,061,802,500	265,292,500	-	-	-	-	2,327,095,000	2,045,715,000	258,558,223	-	-	-	-	2,304,273,223	99.02	
	Monitoring opini dan aspirasi publik	5,500,000	24,750,000	-	-	-	-	30,250,000	4,700,000	24,490,212	-	-	-	-	29,190,212	96.50	
	Monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi pemerintah daerah	11,400,000	10,625,000	-	-	-	-	22,025,000	11,400,000	10,584,750	-	-	-	-	21,984,750	99.82	
	Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	1,998,902,500	88,373,500	-	-	-	-	2,087,276,000	1,985,015,000	88,373,500	-	-	-	-	2,073,388,500	99.33	
	Pelayanan informasi publik	22,000,000	41,700,000	-	-	-	-	63,700,000	21,200,000	40,691,499	-	-	-	-	61,891,499	97.16	
	Layanan hubungan media	18,000,000	80,844,000	-	-	-	-	98,844,000	18,000,000	76,332,673	-	-	-	-	94,332,673	95.44	
	Penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik	6,000,000	19,000,000	-	-	-	-	25,000,000	5,400,000	18,085,589	-	-	-	-	23,485,589	93.94	

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2021															Keterangan
		Jumlah Pagu							Realisasi							Capaian (%)	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	Program pengelolaan aplikasi informatika	2,122,800,000	524,290,000	-	-	-	445,000,000	3,092,090,000	2,034,307,500	505,328,714	-	-	-	443,970,000	2,983,606,214	96.49	
	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	1,950,600,000	178,590,000	-	-	-	175,000,000	2,304,190,000	1,886,107,500	176,777,114	-	-	-	174,405,000	2,237,289,614	97.10	
	Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah daerah	1,950,600,000	178,590,000	-	-	-	175,000,000	2,304,190,000	1,886,107,500	176,777,114	-	-	-	174,405,000	2,237,289,614	97.10	
	Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota	172,200,000	345,700,000	-	-	-	270,000,000	787,900,000	148,200,000	328,551,600	-	-	-	269,565,000	746,316,600	94.72	
	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten / kota	-	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	21,871,600	-	-	-	-	21,871,600	87.49	
	Pengelolaan pusat data pemerintah daerah	-	25,000,000	-	-	-	-	25,000,000	-	13,000,000	-	-	-	-	13,000,000	52.00	
	Pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik	172,200,000	295,700,000	-	-	-	270,000,000	737,900,000	148,200,000	293,680,000	-	-	-	269,565,000	711,445,000	96.41	
4	Program penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	11,400,000	85,914,000	-	-	-	-	97,314,000	11,400,000	79,175,334	-	-	-	-	90,575,334	93.08	
	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota	11,400,000	85,914,000	-	-	-	-	97,314,000	11,400,000	79,175,334	-	-	-	-	90,575,334	93.08	
	Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	4,600,000	71,400,000	-	-	-	-	76,000,000	4,600,000	64,661,334	-	-	-	-	69,261,334	91.13	
	Peningkatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi	6,800,000	14,514,000	-	-	-	-	21,314,000	6,800,000	14,514,000	-	-	-	-	21,314,000	100.00	

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2021															Keterangan
		Jumlah Pagu							Realisasi							Capaian (%)	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	19,000,000	54,856,000	-	-	-	-	73,856,000	19,000,000	49,984,000	-	-	-	-	68,984,000	93.40	
	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota	7,000,000	19,816,000	-	-	-	-	26,816,000	7,000,000	19,158,000	-	-	-	-	26,158,000	97.55	
	Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik	7,000,000	19,816,000	-	-	-	-	26,816,000	7,000,000	19,158,000	-	-	-	-	26,158,000	97.55	
	Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota	12,000,000	35,040,000	-	-	-	-	47,040,000	12,000,000	30,826,000	-	-	-	-	42,826,000	91.04	
	Operasional jaringan komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota	12,000,000	35,040,000	-	-	-	-	47,040,000	12,000,000	30,826,000	-	-	-	-	42,826,000	91.04	
	Jumlah Pagu Anggaran	6,817,976,362	1,562,198,200	-	-	-	760,915,000	9,141,089,562	6,587,067,523	1,497,696,346	-	-	-	759,182,000	8,843,945,869	96.75	

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa focus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bis dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pencapaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat kedalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.

Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik pada Tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang komunikasi dan informatika, statistic dan persandian dengan melakukan peningkatan peleyanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawain dan perencanaan.
2. Capaian kinerja program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

2. Rasio Belanja Terhadap Sasaran Perangkat Daerah

Rasio Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo terhadap sasaran strategis perangkat daerah sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2021		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang TIDAK Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2021		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 45,000,000	Rp 33,618,200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3,448,684,569	Rp 3,304,623,276	
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp 36,000,000	Rp 31,118,200	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp 2,480,173,862	Rp 2,357,032,523	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 23,500,000	Rp 21,368,200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2,480,173,862	Rp 2,357,032,523	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp 296,762,000	Rp 280,620,779	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 28,460,000	Rp 28,460,000	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 266,802,000	Rp 250,660,779	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3,500,000	Rp 3,500,000	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 326,615,000	Rp 325,912,000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4,500,000	Rp 1,750,000	Pengadaan mebel	Rp 62,165,000	Rp 62,165,000	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp 9,000,000	Rp 2,500,000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 264,450,000	Rp 263,747,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 4,500,000	Rp 1,250,000	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 290,133,707	Rp 286,253,536	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 4,500,000	Rp 1,250,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 50,954,700	Rp 50,954,700	

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis	Anggaran Tahun 2021		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang TIDAK Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2021		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya penyebaran informasi publik secara cepat berbasis elektronik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 2,627,135,000	Rp 2,604,273,223	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 239,179,000	Rp 235,298,828	
		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2,627,135,000	Rp 2,604,273,223	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 55,000,000	Rp 54,804,438	
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp 30,250,000	Rp 29,190,212	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 7,000,000	Rp 6,904,870	
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Rp 22,025,000	Rp 21,984,750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 18,000,000	Rp 17,899,568	
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp 2,087,276,000	Rp 2,073,388,500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	
		Pelayanan Informasi Publik	Rp 63,700,000	Rp 61,891,499				
		Layanan Hubungan Media	Rp 398,884,000	Rp 394,332,673				
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 25,000,000	Rp 23,485,589				
3	Meningkatnya konektivitas layanan pemerintahan dan layanan publik perangkat daerah berbasis elektronik secara aman	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMASI	Rp 3,092,090,000	Rp 2,983,606,214				
		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2,304,190,000	Rp 2,237,289,614				
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Rp 2,304,190,000	Rp 2,237,289,614				
		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 787,900,000	Rp 746,316,600				
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25,000,000	Rp 21,871,600				
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp 25,000,000	Rp 13,000,000				
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 737,900,000	Rp 711,445,000				

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis	Anggaran Tahun 2021		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang TIDAK Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2021		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Meningkatnya konektivitas layanan pemerintahan dan layanan publik perangkat daerah berbasis elektronik secara aman	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 26,816,000	Rp 26,158,000				
		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 26,816,000	Rp 26,158,000				
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp 26,816,000	Rp 26,158,000				
5	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang akuntabel	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 97,314,000	Rp 90,575,334				
		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 97,314,000	Rp 90,575,334				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 76,000,000	Rp 69,261,334				
		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp 21,314,000	Rp 21,314,000				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 47,040,000	Rp 42,826,000				
		PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 47,040,000	Rp 42,826,000				
		Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 47,040,000	Rp 42,826,000				
	Jumlah pagu anggaran dan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran strategis perangkat daerah		Rp 5,935,395,000	Rp 5,781,056,971	Jumlah pagu anggaran dan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak terkait langsung dengan sasaran strategis perangkat daerah	Rp 3,687,863,569	Rp 3,539,922,104	

Berdasarkan tabel di atas, rasio belanja yang terkait dengan sasaran strategis perangkat daerah sebesar 97,40% dan rasio belanja yang tidak terkait dengan sasaran strategis perangkat daerah sebesar 95,99%, dengan demikian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Wajo, rasio belanja yang terkait dengan sasaran perangkat daerah lebih besar dibandingkan dengan rasio belanja yang tidak terkait dengan sasaran perangkat daerah.

3. Rasio Belanja Terhadap Sasaran RPJMD

Tabel 3.10.

Rasio Belanja Terhadap Sasaran Strategis RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2021		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang TIDAK Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2021		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 45,000,000	Rp 33,618,200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 3,448,684,562	Rp 3,304,623,268	
		PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Rp 36,000,000	Rp 31,118,200	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp 2,480,173,862	Rp 2,357,032,523	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 23,500,000	Rp 21,368,200	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2,480,173,862	Rp 2,357,032,523	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Rp 296,762,000	Rp 280,620,779	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 28,460,000	Rp 28,460,000	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 1,125,000	Rp 1,125,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 266,802,000	Rp 250,660,779	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 3,500,000	Rp 3,500,000	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp 326,615,000	Rp 325,912,000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 4,500,000	Rp 1,750,000	Pengadaan mebel	Rp 62,165,000	Rp 62,165,000	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Rp 9,000,000	Rp 2,500,000	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 264,450,000	Rp 263,747,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 4,500,000	Rp 1,250,000	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Rp 290,133,700	Rp 286,253,528	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp 4,500,000	Rp 1,250,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 50,954,700	Rp 50,954,700	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 2,627,135,000	Rp 2,604,273,223	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 239,179,000	Rp 235,298,828	
		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Rp 2,627,135,000	Rp 2,604,273,223	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG	Rp 55,000,000	Rp 54,804,438	
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp 30,250,000	Rp 29,190,212	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan	Rp 7,000,000	Rp 6,904,870	
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda	Rp 22,025,000	Rp 21,984,750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,	Rp 18,000,000	Rp 17,899,568	
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Rp 2,087,276,000	Rp 2,073,388,500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 30,000,000	Rp 30,000,000	
			Rp 63,700,000	Rp 61,891,499	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 97,314,007	Rp 90,575,342	
		Pelayanan Informasi Publik			PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 97,314,007	Rp 90,575,342	
		Layanan Hubungan Media	Rp 398,884,000	Rp 394,332,673	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Rp 76,000,000	Rp 69,261,334	
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Rp 25,000,000	Rp 23,485,589				

No.	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2021		Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Yang TIDAK Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis RPJMD	Anggaran Tahun 2021		Keterangan
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMASI	Rp 3,092,090,000	Rp 2,983,606,214	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Rp 21,314,000	Rp 21,314,000	
		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 2,304,190,000	Rp 2,237,289,614	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 47,040,000	Rp 42,826,000	
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah	Rp 2,304,190,000	Rp 2,237,289,614	PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 47,040,000	Rp 42,826,000	
		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 787,900,000	Rp 746,316,600	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 47,040,000	Rp 42,826,000	
		Penatalaksanaan dan Pengawasan e-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25,000,000	Rp 21,871,600				
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Rp 25,000,000	Rp 13,000,000				
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp 737,900,000	Rp 711,445,000				
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 26,816,000	Rp 26,158,000				
		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp 26,816,000	Rp 26,158,000				
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp 26,816,000	Rp 26,158,000				
	Jumlah pagu anggaran dan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran strategis RPJMD		Rp 5,791,041,000	Rp 5,647,655,637	Jumlah pagu anggaran dan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak terkait langsung dengan sasaran strategis RPJMD	Rp 3,593,038,569	Rp 3,438,024,610	

Berdasarkan tabel di atas, rasio belanja yang terkait dengan sasaran strategis RPJMD sebesar 97,52% dan rasio belanja yang tidak terkait dengan sasaran strategis RPJMD sebesar 95,69%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggantikan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Penyelenggaraan berbagai program dan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2021 yang merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024. Setiap keberhasilan yang telah dicapai merupakan wujud kerjasama dan partisipasi dari semua pihak yang diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi di masa mendatang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja sebagaimana yang diuraikan pada Bab III, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo Tahun 2021 secara keseluruhan berhasil, meskipun masih ada beberapa indikator yang belum dinilai karena dinilai oleh pihak eksternal. Harapan kami bahwa dari hasil pengukuran kinerja yang tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

B. SARAN

Dalam rangka upaya perbaikan berkelanjutan bagi instansi pemerintah terutama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo untuk meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengelolaan opini publik dan percepatan penanganan aduan masyarakat serta pelayanan kedaruratan masyarakat.
2. Penataan Kelompok Informasi Masyarakat.

3. Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Pakar, Ahli dan Perguruan Tinggi dalam pengembangan aplikasi layanan publik dan aplikasi manajemen pemerintahan.
4. Pengelolaan dan pengembangan data centre sebagai pusat data dan informasi, diseminasi dan analisis data statistik sektoral.
5. Pengamanan informasi melalui jaringan komunikasi sandi dan audit keamanan sandi.
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan dan sosialisasi, bimbingan teknis dan coaching clinic.
7. Pemberian punishment and reward terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pendataan.

Sengkang, 14 Januari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KABUPATEN WAJO,**



Drs. DWI APRYANTO, S.H., M.T., M.Si.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19740411 199303 1 002